

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Rizka Amalia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
rizka.create@yahoo.com

ABSTRAK

New public management adalah pendekatan administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Dalam implementasi NPM akuntansi memiliki peranan penting salah satunya adalah implementasi akuntansi berbasis akrual dan anggaran berbasis kinerja. PP NO. 71 tahun 2010 yang merupakan standart penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk organisasi Pemerintah salah satunya adalah BLU. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah ditetapkan menjadi BLU penuh pada tahun 2008 oleh menteri keuangan pada KMK Nomor 68/KMK.05/2008.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer, yang menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi kepada informan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 2014 di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 *Cash Towart to Accrual*. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 karena pada tahun 2015 UIN Maliki Malang Laporan Keuangan juga masih *Cash Towart to Accrual* karena dalam standart dinyatakan untuk tahun 2015 harus sudah *Full Accrual*. Kendala yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang karena tidak adanya titik temu antara KPPN dan UIN Maliki Malang.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010, *Accrual Basis*, Badan Layanan Umum, SAP.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah pengemban tanggung jawab kepentingan publik, yaitu salah satunya sebagai penanggungjawab pengelola dana publik yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas publik)

kepada masyarakat secara luas. Pada awalnya perkembangan akuntabilitas publik ditandai dengan munculnya *New Public Management (NPM)*, hal ini dikarenakan banyaknya kritikan dan tuntutan akuntabilitas yang ditujukan kepada organisasi sektor publik untuk melakukan reformasi manajemen. Oleh karena itu dilakukan perubahan dalam organisasi sektor publik dengan mengadopsi pendekatan “*reinventing government*” (Osborne dan Gaebler, dalam Mardiasmo, 2009:79).

NPM adalah bentuk korporatisasi lembaga Sektor publik (Marobela, 2008 dalam Pujiningsih, 2014), termasuk organisasi pendidikan (Ngok dan Kwong, 2003 dalam Pujiningsih, 2014). Salah satu bentuk dari *NPM* adalah Badan Layanan Umum (BLU). Untuk pengimplementasian *NPM*, akuntansi memiliki peranan penting yaitu melalui penerapan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kinerja.

Menurut Amirya, Djamhuri dan Ludigdo (2012) Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan BLU diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada umumnya peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa sebuah instansi yang menggunakan model BLU harus menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis akrual. Sehingga akuntansi basis akrual merupakan *Internasional Best Practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas penegelolaan keuangan. Sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan

Badan Layanan Umum (BLU) harus diterapkan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Malang yang merupakan badan layanan umum dibawah Kementerian Agama yang harus menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dalam pelaporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Kepala Bagian Keuangan Bu Triasih menjelaskan secara sekilas tentang penerapan PP No 71 tahun 2010 di UIN Maliki Malang

“Penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada badan Layanan Umum yaitu UIN Maliki Malang belum maksimal dikarenakan masih belum memahami secara mendalam untuk laporan keuangan berbasis Akrual (full accrual).”

Dari wawancara sementara itulah peneliti ingin meneliti kembali tentang penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana penerapan PP No 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PP No 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KAJIAN PUSTAKA

NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management*. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Alasan munculnya teori manajemen publik Menurut Huges (1991) alasan munculnya new public management adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan administrasi publik tradisional dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Adanya dorongan untuk mengganti tipe birokrasi yang klasik.
3. Perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi yang lebih jelas untuk mengukur keberhasilan kinerja.
4. Perlunya para pegawai senior memiliki komitmen politik pada pemerintah
5. Fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah disesuaikan dengan tuntutan dan signal pasar.
6. Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi Pemerintah.

Menurut Martin Minogue (2000) dengan menyebut adanya 3 tekanan yang menyebabkan perlu adanya perubahan paradigma menuju ke Public management yaitu:

1. Semakin membesarnya anggaran pemerintah
2. Rendahnya mutu kinerja pemerintah
3. Adanya nilai ideologi yang bersifat konfliktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

Menurut Abdullah (2006:37) tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menurut Wibawa (2012) BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Menurut Biro Keuangan KEMENDIKBUD Badan Layanan Umum (BLU) Badan Layanan Umum dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelolanya, menyusun 2 (dua) Laporan Keuangan yaitu laporan keuangan berbasis SAK dan Laporan Keuangan berbasis SAP. Adapun laporan menurut SAP adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Akuntansi pemerintah di Indonesia dilandasi dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), yang disertai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP), bulletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai juga interprestasinya, (Mursyidi, 2009: 21). Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 (2010: 1) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Renyowijoyo (2008: 171) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang penerapan PP No. 71 tahun 2010 sebagai landasan penyusunan Laporan keuangan yang ada di UIN Maliki Malang. Data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi langsung kepada informan. Analisis penerapan PP No.71 Tahun 2010 dilakukan dengan membandingkan antara praktik lapangan dengan pengaplikasian sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Dalam melakukan analisis peneliti membandingkan penyusunan Laporan keuangan yang sudah dilakukan dengan standart yang ada yaitu PP No. 71 tahun 2010 tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI. Dengan perbandingan tersebut peneliti dapat menggambarkan penerapan PP No. 71 tahun 2010 yang dilaksanakan BLU.

PEMBAHASAN

Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

Pengelolaan keuangan PTN yang menerapkan BLU diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Untuk Laporan Keuangan tahun 2014 UIN Maliki Malang masih berbasis *Cash Toward To Accrual* terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan, penerapan yang dilakukan oleh UIN maliki malang yaitu dengan mengakui pendapatan dan belanja dengan basis kas sementara untuk neraca yaitu aset kewajiban dan Modal pengakuannya dengan basis akrual. Pada periode ini yaitu tahun 2015 UIN Maliki malang mulai menerapkan akuntansi berbasis Akrual pada penyusunan laporannya.

NERACA

Penyajian laporan Neraca yang disajikan oleh Uin Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dengan lampiran 2 yang menjelaskan laporan keuangan dengan dasar atas laporan keuangan *Cash Towart to Accrual* dimana dalam penyajian untuk neraca disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Sementara yang sudah dilakukan oleh UIN Maliki Malang atas pengakuan aset kewajiban dan ekuitas pengakuannya sudah akrual.

LAPORAN AKTIVITAS DAN LAPORAN LRA

Laporan Realisasi Anggarannya untuk tahun 2014 belum sudah dengan PP No 71 Tahun 2010 dalam standar tersebut dijelaskan bahwa untuk organisasi yang belum siap secara penuh menggunakan akrual basis sepenuhnya menggunakan dasar atas Laporan keuangan dengan basis Cash Towart to Accrual dimana dalam dalam standar tersebut dijelaskan untuk basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja, sementara yang terjadi di UIN Maliki malang untuk pengakuan belanja untuk pegawai dan belanja operasional pengakuannya masih cash basis, Sedangkan pendapatan pengakuannya sebagian berbasis akrual dan sebagian berbasis kas, sehingga perlu adanya penyesuaian pada akhir periode atas pendapatan dan belanja yang pengakuannya masih berbasis kas. Sehingga LRA dapat disusun sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, dimana dengan adanya penyesuaian tersebut dalam penyusunan laporan LRA tersebut pengakuan atas pendapatan dan belanja dari awal seolah-olah sudah menggunakan accrual basis. Beritupun yang terjadi pada tahun 2015 untuk pengakuan atas belanja dan beban masih sama menggunakan basis kas sedangkan dalam standart harus sudah akrual untuk tahun 2015 sehingga untuk Laporan keuangan 2015 LRA belum sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGA

Catatatan atas Laporan keuangan yang disajikan oleh UIN Maliki Malang tidak sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 sehingga penjelasan-penjelasan seperti pengukuran rekening-rekening yang perlu dinformsikan kepada pengguna Laporan keuangan, seperti metode penyusutan atas aset tetap serta pengukuran aset juga perlu disajikan, Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan atas laporan keuangan juga perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu juga menjelaskan atas rincian pendapatan dan belanja yang diperoleh dan yang dikeluarkan oleh UIN Maliki Malang, informasi tentang dasar pengukuran atas penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya informasi tersebut penguuna dapat lebih memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Serta juga dapat membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Analisis Penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibragim Malang dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan Pada tahun 2014 sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 yaitu menggunakan *Cash Towart To Accrual*, pengakuan atas belanja dan beban berdasarkan basis kas sementara untk penagukan atas aset, kewajiban dan modal sudah menggunakan basis akrual. Sedangkan untuk periode tahun 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena pengakuan atas pendapatan dan belanja masih sama dengan tahun 2014 yaitu *Cash Toward to Accrual*. Sedangkan di dalam PP No 71 Tahun 2010 untuk Laporan Keuangan Tahun 2015 harus sudah *Full Accrual*. Kendala yang diperoleh UIN Maliki Malang adalah karena pihak KPPN tidak Mengakui atas Utang untuk belanja yang masih harus dibayar sedangkan UIN Maliki Malang harus mengakui utang atas belanja yang masih harus dibayar. Karena tidak adanya titik temu antara keduanya sehingga UIN maliki Malang Mengikuti pusat yaitu KPPN.

SARAN

Penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan instansi pemerintah, untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual secara keseluruhan pemerintah memberikan waktu hingga tahun 2015 laporan keuangan instansi pemerintahan harus udah *Full Accrual* sehingga peneliti menyarankan kepada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2015 berdasarkan basis Akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo .2009. *Akuntansi sektor Publik Edisi Revisi*, Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Pujiningsih, Sri., 2014. Jurnal. *Globalisasi Ekonomi: Korporatisasi Perguruan Tinggi (Peran Akuntansi Dalam Tinjauan Teori Kritis Habermas)*. Universitas Negeri Malang: Malang
- Amirya, Mirna., dkk. 2012. Jurnal. *Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya: Sebuah Studi Interpretif*. Universitas Brawijaya: Malang
- Abdullah, Amin Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Yogyakarta. 2006. hlm. 37
- Wibawa, Sutrisna. 2012. Jurnal. *Implementasi Pengelolaan BLU Di Perguruan Tinggi*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Mursyidi, 2009, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung
- Renyowijoyo Muindro, 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba Edisi Pertama*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta